



Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa Tambakbaya Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut

Ayu Sri Rahayu¹ ; Marti Dewi Ungkari² ; Windi Ariesti Anggraeni³

¹ Universitas Garut

24022121022@uniga.ac.id

² Universitas Garut

m.ungkari@uniga.ac.id

³ Universitas Garut

windiariesti@uniga.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi keuangan dengan menilai kinerja keuangan Pemerintahan Desa Tambakbaya Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut. Metode penelitian yang di terapkan merupakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan, dokumentasi, serta wawancara. Selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan rasio keuangan daerah, yang mencakup Rasio Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi, Keserasian, serta Pertumbuhan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kinerja keuangan Pemerintahan Desa Tambakbaya selama periode 2019-2023 dapat dikatakan cukup baik, hal ini di terlihat dari rasio kemandirian, pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja masih dikatakan sangat rendah. Sementara untuk rasio efektivitas, efisiensi, keserasian belanja rutin dan belanja modal sudah cukup baik.

Kata kunci: Kinerja Keuangan, Rasio Pemerintah Daerah

Abstract

This study aims to analyze the financial condition by assessing the financial performance of the Tambakbaya Village Government, Cisarupan District, Garut Regency. The research method applied is a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected through literature study methods, documentation, and interviews. Furthermore, an analysis was conducted using regional financial ratios, which include the Independence, Effectiveness, Efficiency, Harmony, and Growth Ratios. From the results of the study, it is known that the financial performance of the Tambakbaya Village Government during the 2019-2023 period can be said to be quite good, this is seen from the independence ratio, revenue growth and expenditure growth are still said to be very low. Meanwhile, the ratio of effectiveness, efficiency, harmony of routine expenditure and capital expenditure is quite good.

Keywords: Financial Performance, Local Government Ratios

1 Pendahuluan

Desa adalah bagian dari pemerintah yang memiliki keterkaitan langsung dengan orang-orang dari segala latar belakang dan memiliki tugas penting, terutama dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Pemerintah Desa menjalankan pemerintahan desa, menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Syah et al., 2021).

Pemerintah daerah merupakan bagian penting dari membangun suatu desa yang sejahtera karena mereka memiliki wewenang untuk mengelola dan mengatur keuangan untuk pembangunan, yang didukung oleh autonomi dalam perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Pemerintah setempat harus secara optimal mengelola sumber daya pembangunan agar dapat digunakan untuk pembangunan desa dan kesejahteraan sosial masyarakat (Syah et al., 2021).

Pengelolaan keuangan di tingkat desa yang dilakukan dengan benar akan memberikan efek positif bagi perkembangan desa. Sehubungan dengan itu, pengelolaan keuangan desa memerlukan orang-orang yang cerdas dan terampil, dan juga membutuhkan cukup uang agar dapat berjalan dengan baik. Bagaimana desa memperoleh uangnya mempengaruhi apakah desa tersebut dapat memiliki dana atau tidak. Pengelolaan keuangan yang baik membantu desa berjalan lancar dan berfungsi dengan baik dalam mengurus masyarakatnya (Manan et al., 2022).

Untuk mencapai kualitas pengelolaan keuangan desa yang optimal, diperlukan tanggung jawab perangkat desa, kapabilitas perangkat desa yang kuat, dan penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) yang baik, Ayem dan Fitriyaningsih (2022). Salah satu komponen kelemahan yang dimiliki oleh perangkat desa adalah kualitas sumber daya perangkat desa (Thomas, 2013). Dalam melaksanakan fungsi perangkat desa, khususnya di bidang pengelolaan keuangan desa, sangat diperlukan kompetensi yang kuat mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, kemampuan, serta sikap. Kusuma dan Ardhiarisca (2022) dalam (Ningsih & Anggraeni, 2023).

Kinerja keuangan ialah hasil dari tindakan dan program yang tercapai terkait pemanfaatan anggaran, yang dapat dihitung menggunakan angka atau kualitasnya. Sehubungan dengan itu, aktivitas anggaran pemerintah daerah melibatkan kegiatan di sektor keuangan daerah, mencakup pengelolaan anggaran serta realisasi PAD, dilakukan dengan menggunakan indikator keuangan yang sudah ditentukan dengan ketentuan masa anggaran negara atau politik (Ramadana et al., 2023).

Dibawah ini adalah Tabel 1 Data Anggaran Pendapatan Desa Tambakbaya Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut.

Pendapatan	2019	2020	2021	2022	2023
Pendapatan Asli Desa	10.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Hasil Usaha Desa	5.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Sewa Tanah Carik	5.000.000	0	0	0	0
Pendapatan Transfer	1.496.380.018	1.954.844.474	1.849.375.590	1.750.449.176	2.117.210.893
Dana Desa	930.461.000	1.238.699.000	1.169.762.000	1.183.006.000	1.028.699.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	29.279.018	30.000.000	30.000.000	22.265.354	39.157.818

Alokasi Dana Desa	421.640.000	516.145.474	463.153.590	414.177.822	419.354.075
Bantuan Keuangan Provinsi	115.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	630.000.000
Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota	0	40.000.000	56.460.000	0	0
Pendapatan Lain-lain	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
Bunga Bank	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
Jumlah	1.506.380.018	1.955.844.474	1.855.375.590	1.755.449.176	2.122.210.893

Sumber: APBDes Desa Tambakbaya (2025)

Berdasarkan fenomena tersebut, menunjukkan bahwa adanya penurunan PAD, yang merupakan permasalahan yang terjadi akibat tidak disewakannya kembali tanah carik desa yang yang sampai saat ini menjadi bagian penting dari pendapatan utama Desa Tambakbaya. Selain itu, keterbatasan potensi yang dimiliki desa serta kurangnya inovasi dan kreativitas pemerintah desa dalam mengembangkan unit-unit usaha produktif turut menjadi faktor yang menyebabkan PAD tidak mengalami peningkatan secara signifikan.

2 Tinjauan Pustaka

2.1 Rasio Kemandirian

Menurut Mahmudi (2019) rasio kemandirian mencerminkan kapasitas pemerintah daerah untuk mendanai secara mandiri aktivitas pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan public menjadi sumber pemasukan daerah yang diperoleh melalui pajak dan retribusi. Terlebih lagi, tingkat kemandirian ini menggambarkan sejauh mana pembiayaan daerah masih ditopang oleh dana yang berasal dari eksternal, khususnya pemerintah pusat maupun provinsi.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah/Desa}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Tabel 2. Pola hubungan dan tingkat kemampuan desa

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75 %	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: (Mahmudi, 2019).

- Instruktif terjadi ketika daerah belum memiliki kapasitas untuk menjalankan otonominya secara penuh, sehingga dominasi pemerintah pusat lebih menonjol dibandingkan kemandirian daerah.
- Konsultatif ditandai dengan semakin terbatasnya campur tangan pemerintah pusat, seiring dengan meningkatnya kemampuan daerah dalam menjalankan kewenangan otonom.
- Partisipatif tercermin dari semakin terbatasnya peran pusat, karena daerah sudah mencapai tingkat otonomi yang matang dan mampu menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri.
- Delegatif tercermin dari hilangnya keterlibatan langsung pemerintah pusat, karena daerah sudah sepenuhnya mampu mengelola urusannya secara independen.

2.2 Rasio Efektivitas

Menunjukkan sejauh mana kapasitas pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan PAD sesuai rencana, bila di seajarkan dengan sasaran yang direncanakan berlandaskan potensi akrual daerah. Perhitungan rasio efektivitas Pendapatan Asli Desa dilakukan melalui penilaian posisi ketercapaian realisasi penerimaan PAD terhadap sasaran pendapatan yang telah dianggarkan (Mahmudi, 2019).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3. Standar Penilaian Efektivitas Keuangan Daerah

Kriteria	Persentase
Sangat Efektif	Di atas 100%
Efektif	90% - 100%
Cukup Efektif	80% - 90%
Kurang Efektif	60% - 80%
Tidak Efektif	< 60%

Sumber: (Mahmudi, 2019).

2.3 Rasio Efisiensi

Digunakan untuk menilai level efisiensi penggunaan biaya, yaitu dengan mengukur besarnya pengeluaran dalam upaya menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan pendapatan yang terealisasi. Jika rasio yang diperoleh berada di bawah angka 1 atau kurang dari 100 persen, maka pelaksanaan pemungutan pendapatan oleh pemerintah daerah dapat dianggap efisien (Faud, 2016).

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4. Penilaian Efisiensi Keuangan Daerah

Kriteria	Persentase
Tidak Efisien	Di atas 100%
Efisien Berimbang	100%
Efisien	Kurang dari 100%

Sumber: (Mahmudi, 2019)

2.4 Rasio Kesenjangan

Berfungsi untuk menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah memberikan prioritas pada alokasi dana antara belanja rutin dan belanja modal dengan hasil yang terbaik. Pada penerapannya, rasio ini mencakup dua kelompok, yaitu rasio belanja rutin dan rasio belanja modal (Faud 2016). Belanja operasi sendiri mencakup pengeluaran yang bersifat jangka pendek dan manfaatnya hanya berlaku dalam satu tahun anggaran, belanja ini bersifat rutin atau berulang. Secara umum, dengan kisaran 60% hingga 90%, biaya operasional merupakan porsi terbesar dari seluruh pengeluaran daerah. Selain itu, persentase yang lebih tinggi dari biaya operasional sering kali dikeluarkan oleh Pemerintah daerah dengan pendapatan yang lebih besar berpotensi mengeluarkan anggaran lebih besar daripada daerah yang berpendapatan lebih kecil.(Mahmudi, 2010).

Ukuran yang membandingkan total belanja modal dengan total belanja daerah dikenal dengan istilah rasio belanja modal. Melalui rasio ini, pembaca laporan dapat memahami porsi anggaran daerah yang digunakan untuk kegiatan investasi berupa belanja modal dalam periode anggaran tertentu. Pengeluaran modal dilakukan secara berkala dan menghasilkan manfaat dalam periode menengah hingga jangka panjang. Belanja modal biasanya mencapai antara 5% dan 20% dari seluruh belanja daerah (Mahmudi, 2010).

$$\text{a. Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Tabel 5. Standar penilaian dalam pelaksanaan belanja rutin

Kriteria	Persentase
Baik	Di bawah 40%
Cukup Baik	40%-80%
Kurang Baik	80%-100%

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 dalam (Anugeraheni & Yuniarta, 2022)

b. Rasio Belanja Modal = $\frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$

Tabel 6. Standar penilaian dalam pelaksanaan belanja modal

Kriteria	Persentase
Kurang Baik	0%-10%
Cukup Baik	10%-40%
Baik	Di atas 40%

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 dalam (Anugeraheni & Yuniarta, 2022)

2.5 Rasio Pertumbuhan

Rasio ini memiliki fungsi dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah, khususnya dalam melihat adanya peningkatan atau penurunan pendapatan maupun belanja pada suatu tahun anggaran atau dalam periode tertentu (Mahmudi, 2019). Rasio ini mencakup 2 kategori, yakni Rasio Pertumbuhan Pendapatan dan Rasio Pertumbuhan Belanja.

Pertumbuhan pendapatan merupakan salah satu tanda keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi ini diharapkan terjadi setiap tahun, karena dengan adanya kenaikan tersebut, dapat berpengaruh positif terhadap ekonomi daerah serta menjadi langkah menuju kesejahteraan masyarakat (Gultom et al., 2020).

Rasio pertumbuhan belanja berguna dalam memahami perkembangan belanja setiap tahunnya. Secara umum, belanja cenderung selalu meningkat. Rumus berikut digunakan untuk menghitung rasio pertumbuhan pada tingkat daerah (Mahmudi, 2019).

a. Rasio Pertumbuhan Pendapatan = $\frac{\text{Realisasi Pendapatan } X_n - X_{n1}}{\text{Realisasi Pendapatan } X_{n1}} \times 100\%$

b. Rasio Pertumbuhan Belanja = $\frac{\text{Realisasi Belanja } X_n - X_{n1}}{\text{Realisasi Belanja } X_{n1}} \times 100\%$

Keterangan :

X_n : Periode yang diperhitungkan

X_{n1} : Periode terdahulu

Tabel 7. Aspek penilaian dalam menilai perkembangan kondisi keuangan daerah

Kriteria Pertumbuhan	Tingkat Pertumbuhan (%)
Sangat Rendah	0% - 10%
Rendah	11% - 20%
Sedang	21% - 30%
Tinggi	Di atas 40%

Sumber: (Mahmudi, 2019)

3 Metode Penelitian

3.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif yang berlandaskan pada pendekatan kualitatif, Sebagaimana diuraikan oleh Nazir (2014), metode penelitian deskriptif merupakan suatu cara guna mengkaji sekelompok orang, suatu objek, serangkaian peristiwa, suatu cara berpikir, atau suatu jenis peristiwa yang sedang terjadi. Tujuan utama penelitian deskriptif ini ialah untuk menyajikan fakta-fakta dengan jelas, jujur, dan benar, termasuk karakteristik hal-hal yang diteliti.

Menurut Sugiyono & Setiyawani (2022) metode penelitian kualitatif ialah suatu metode yang berpijak pada paradigma postpositivisme atau interpretatif. Metode ini digunakan untuk mengkaji fenomena dalam konteks alaminya, dengan peneliti berkedudukan sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode triangulatif, yaitu melalui teknik observasi, wawancara, serta telaah dokumentasi (Wufron, 2025). Data yang dihimpun bersifat deskriptif kualitatif, dan dianalisis menggunakan pendekatan induktif atau kualitatif. Hasil dari penelitian kualitatif mencakup identifikasi potensi dan permasalahan, pengungkapan karakteristik unik dari objek studi, makna dari peristiwa yang terjadi, proses serta dinamika interaksi sosial, validitas informasi yang diperoleh, perkembangan suatu gejala, hingga perumusan hipotesis.

Tabel 8. Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Kinerja Keuangan (Ramadana et al., 2023).	Rasio Kemandirian	1. Pendapatan Asli Daerah/Desa 2. Pendapatan Transfer	Rasio
	Rasio Efektivitas	1. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Desa 2. Target Penerimaan Pendapatan Asli Desa	
	Rasio Efisiensi	1. Realisasi Belanja Daerah 2. Realisasi Pendapatan Daerah	
	Rasio Kesenjangan	1. Jumlah Belanja Rutin 2. Jumlah Belanja Modal 3. Jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	
	Rasio Pertumbuhan	1. Realisasi pendapatan xn-xn1 2. Realisasi pendapatan xn1 3. Realisasi Belanja xn-xn1 4. Realisasi belanja xn1 Keterangan: Xn = Tahun yang dihitung Xn1 = Tahun sebelumnya	

3.2 Data dan Metode Pengumpulan

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara kepada perwakilan pemerintah dari Desa Tambakbaya tempat penelitian. Sementara sumber data yang diperoleh secara tidak langsung oleh pengumpul data disebut data sekunder, tetapi lewat perantara seperti pihak ketiga atau arsip. Dokumen-dokumen seperti Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Tambakbaya. Menurut Sugiyono & Setiyawani (2022)

1. Studi kepustakaan

Diperoleh melalui analisis terhadap referensi pustaka, termasuk membaca buku, jurnal ilmiah, dan artikel atau sumber media internet yang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian

2. Riset lapangan

a. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan melalui interaksi langsung berupa wawancara dengan informan di mana pada pelaksanaannya peneliti memiliki gagasan yang jelas tentang informasi yang akan diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan wawancara terstruktur dengan informan yang melibatkan unsur perangkat Desa Tambakbaya, yakni sekretaris desa dan kepala urusan keuangan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang diperoleh dari pemerintah Desa Tambakbaya dengan mencari dan mengumpulkan data berupa catatan dokumen maupun foto yang terdapat di Desa Tambakbaya yang berkaitan dengan penelitian seperti laporan APBDes.

3.3 Teknik Analisis Data

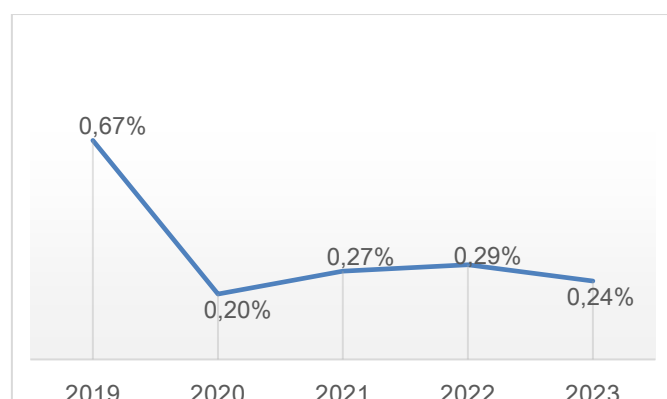
Menurut Sugiyono & Setiyawani (2022), Analisis data kualitatif diterapkan baik saat data dikumpulkan maupun setelahnya, melalui model Miles & Huberman dengan melewati tiga tahapan. Pertama, reduksi data, yaitu penyederhanaan data melalui peringkasan, pemilihan bagian utama, dan pengelompokan aspek relevan, khususnya terkait tata kelola keuangan desa seperti pendapatan dan belanja desa. Kedua, penyajian data, berupa uraian naratif yang dilengkapi tabel, grafik, dan ringkasan untuk memudahkan pemahaman. Ketiga, penarikan/verifikasi kesimpulan, di mana hasil analisis digunakan sebagai upaya mengukur kinerja keuangan desa berdasarkan rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, keserasian dan pertumbuhan.

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Kegiatan tersebut diselenggarakan di wilayah Desa Tambakbaya, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, yang berlangsung sejak Desember 2024 sampai Juni 2025.

4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Rasio Kemandirian



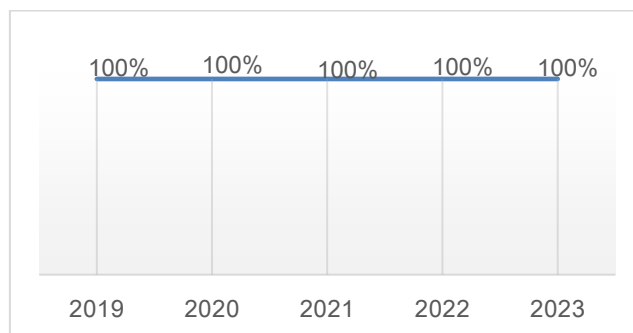
Gambar 1. Rasio Kemandirian

Sumber: APBDes Desa Tambakbaya (Data diolah, 2025)

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Desa Tambakbaya pada periode 2019-2023 berada dalam kategori sangat rendah. Rasio kemandirian tertinggi hanya mencapai 0,67% pada tahun 2019 dan terendah 0,20% pada tahun 2020, dengan tren fluktuatif hingga 2023. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembiayaan desa hampir sepenuhnya mengandalkan dana yang dialokasikan

memalui mekanisme transfer yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah. Sehingga hubungan yang terbentuk bersifat instruktif dan belum mencerminkan otonomi desa. Rendahnya Pendapatan Asli Desa (PAD) terutama disebabkan oleh tidak disewakannya lagi tanah carik desa sebelumnya sumber utama PAD yang kini dikelola langsung oleh masyarakat.

4.2 Rasio Efektivitas

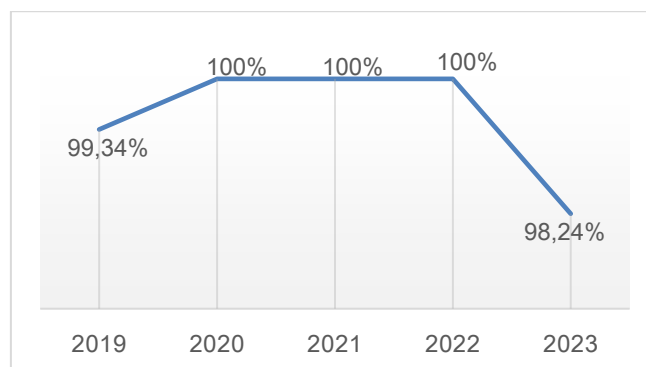


Gambar 2. Rasio Efektivitas

Sumber: APBDes Desa Tambakbaya (Data diolah, 2025)

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Tambakbaya pada periode 2019–2023 konsisten mencapai angka 100% dan masuk dalam kategori efektif. Target PAD setiap tahun selalu terealisasi penuh, meskipun terdapat penurunan target pada tahun tertentu akibat dampak pandemi COVID-19. Konsistensi capaian ini mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola PAD secara stabil, efisien, dan adaptif terhadap tantangan ekonomi. Keberhasilan mempertahankan efektivitas selama lima tahun berturut-turut menegaskan adanya komitmen dan kapasitas yang baik dalam pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

4.3 Rasio Efisiensi

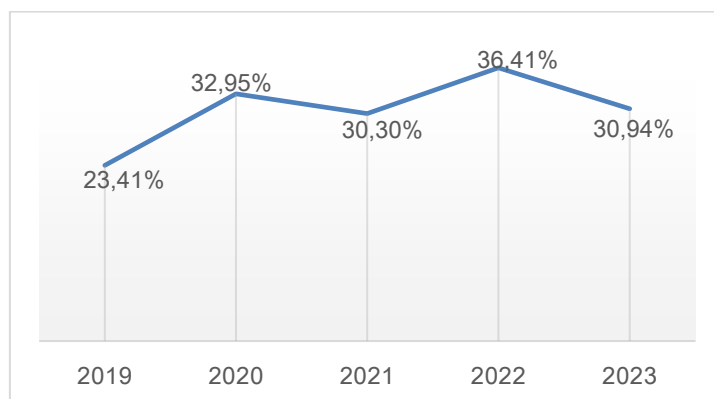


Gambar 3. Rasio Efisiensi

Sumber: APBDes Desa Tambakbaya (Data diolah, 2025)

Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio efisiensi keuangan Desa Tambakbaya pada periode 2019-2023 berada pada kategori efisien hingga efisien berimbang. Tahun 2019 mencapai 99,34%, sedangkan pada 2020-2022 berada pada angka 100% dengan kategori efisien berimbang, dan pada 2023 sebesar 98,24% yang tetap tergolong efisien. Konsistensi ini mencerminkan kemampuan desa dalam menyusun anggaran secara realistis, merealisasikan belanja sesuai pendapatan, serta menghindari pemborosan maupun kekurangan anggaran. Fluktuasi pendapatan dan belanja terutama dipengaruhi oleh adanya bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten maupun provinsi, namun desa mampu menyesuaikan pengeluaran secara proporsional sehingga kinerja pengelolaan keuangan tetap stabil dan efisien.

4.4 Rasio Keserasian Belanja Rutin

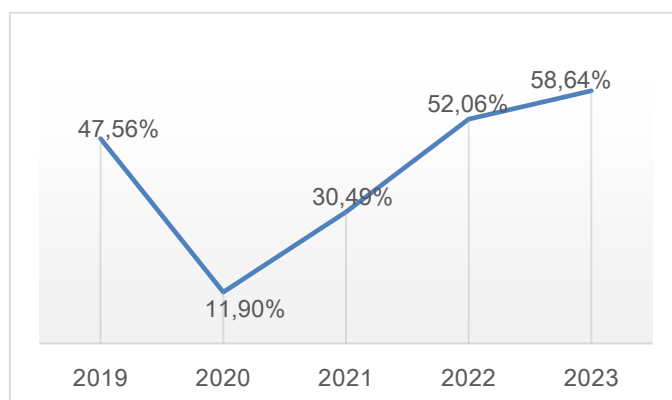


Gambar 4. Rasio Keserasian Belanja Rutin

Sumber: APBDes Desa Tambakbaya (Data diolah, 2025)

Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio belanja rutin Desa Tambakbaya pada periode 2019-2023 selalu berada dalam kategori baik, dengan nilai berkisar antara 23,41% hingga 30,94%. Porsi belanja rutin yang relatif kecil dibandingkan total APBD menunjukkan bahwa alokasi anggaran lebih banyak diarahkan pada kegiatan pembangunan. Fluktuasi rasio terutama dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan transfer, kebutuhan operasional, serta penyesuaian gaji dan tunjangan, namun tetap terkendali di bawah ambang batas 40%.

4.5 Rasio Keserasian Belanja Modal

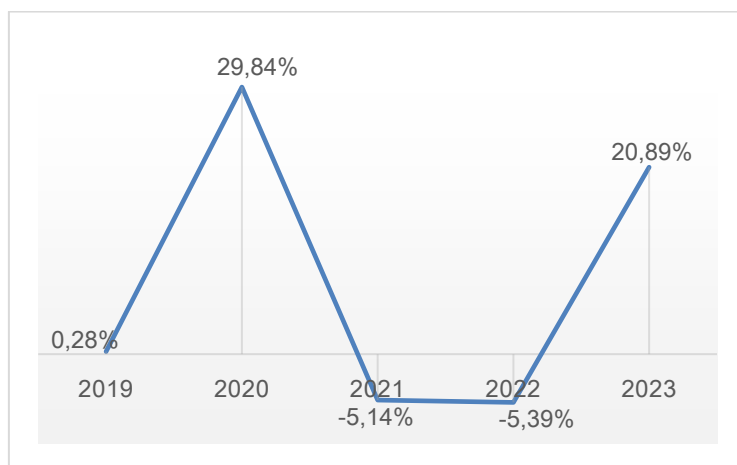


Gambar 5. Rasio Keserasian Belanja Modal

Sumber: APBDes Desa Tambakbaya (Data diolah, 2025)

Rasio belanja modal Desa Tambakbaya periode 2019-2023 berfluktuasi antara kategori cukup baik hingga baik. Setelah turun drastis pada 2020 (11,90%) akibat pandemi, rasio kembali meningkat hingga mencapai 58,64% pada 2023. Kenaikan ini didorong terutama oleh tambahan dana transfer provinsi melalui program aspirasi DPRD untuk pembangunan infrastruktur. Secara keseluruhan, belanja modal menunjukkan komitmen desa dalam memprioritaskan pembangunan fisik demi kesejahteraan masyarakat.

4.6 Rasio Pertumbuhan Pendapatan

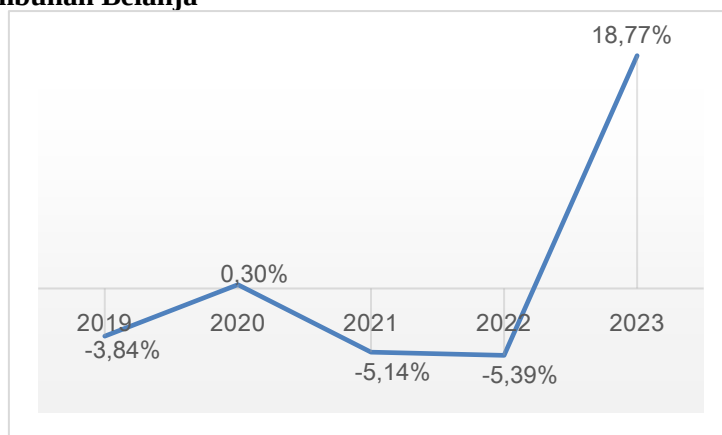


Gambar 6. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Sumber: APBDes Desa Tambakbaya (Data diolah, 2025)

Pertumbuhan pendapatan Desa Tambakbaya 2019–2023 menunjukkan pola fluktuatif. Tahun 2020 naik tajam hingga 29,84%, namun 2021–2022 justru turun masing-masing -5,14% dan -5,39%. Pada 2023 kembali meningkat menjadi 20,89%. Kondisi ini menegaskan ketergantungan tinggi pada dana transfer dan lemahnya PAD, sehingga diperlukan strategi optimalisasi pendapatan lokal untuk keberlanjutan fiskal desa.

4.7 Rasio Pertumbuhan Belanja



Gambar 7. Rasio Belanja Modal

Sumber: APBDes Desa Tambakbaya (Data diolah, 2025)

Realisasi belanja Desa Tambakbaya 2019–2023 menunjukkan tren fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan pada kategori sangat rendah. Tahun 2019–2022 didominasi penurunan akibat terbatasnya dana, berkurangnya transfer pemerintah, tidak adanya program baru, serta dampak pandemi. Tahun 2023 menjadi titik balik dengan kenaikan 18,77% berkat adanya dana aspirasi DPRD Provinsi, meski masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan belanja desa sangat bergantung pada dukungan eksternal, sementara kapasitas fiskal internal masih terbatas.

5 Simpulan dan Saran

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik simpulan bahwa hasil dari penelitian Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa Tambakbaya Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut tahun 2019-2023 dapat dikatakan cukup baik, hal ini terlihat dari rasio kemandirian, pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja dapat dikatakan masih sangat rendah. Sementara untuk rasio efektivitas, efisiensi, keserasian belanja rutin dan belanja modal sudah cukup baik.

5.2 Saran

1. Pemerintah Desa Tambakbaya perlu meningkatkan kemandirian, pertumbuhan pendapatan, dan belanja melalui pengembangan BUMDes, penambahan unit usaha sesuai potensi lokal (sarana pertanian, warung sembako, jasa, perdagangan), serta penguatan manajemen. Diversifikasi pendapatan dari sektor potensial diharapkan dapat meningkatkan PAD sehingga memberi ruang fiskal lebih luas bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah dengan membandingkan beberapa desa serta menggunakan metode mixed method agar hasil lebih komprehensif dan mampu menggali faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan desa secara lebih mendalam.

Daftar Pustaka

- Anugeraheni, N. K. D., & Yuniarta, G. A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Desa dengan Menggunakan Rasio Keuangan Daerah pada Pemerintah Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 13(2), 426–437.
- Faud, M. R. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (R. Sikumbang (ed.)). Ghalia Indonesia.
- Gultom, M., Sinurat, A., & Damanik, D. (2020). Analisis Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 12–17. [https://doi.org/Gultom, M., Sinurat, A., & Damanik, D. \(2020\). Analisis Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Pematangsiantar. 2\(1\), 12–17.](https://doi.org/Gultom, M., Sinurat, A., & Damanik, D. (2020). Analisis Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Pematangsiantar. 2(1), 12–17.)
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (4th ed.). UPP STIM YKPN.
- Manan, L. O. A., Djauhar, A., & Nurlela. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Lashunggumbi) Kecamatan Pongidaha Kabupaten Konawe. *Sultra Journal of Economic and Business*, 3(1), 8–19. <https://doi.org/10.54297/sjeb.vol3.iss1.227>
- Ningsih, W., & Anggraeni, W. A. (2023). The Role of The Village Financial System (Siskeudes) in Mediating The Relationship Between The Role of Village Apparatus and The Competency of Village Apparatus Towards Accountability for Village. *Wacana Ekonomi*, 23(01), 035–048. www.jurnal.uniga.ac.id
- Ramadana, S. W., Mariana, M., Rahmiani, R., & Bahgia, S. (2023). Determinansi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Owner Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1831–1840. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1590>
- Sugiyono, & Setiyawani. (2022). *Metode Penelitian Sumber Daya Manusia (Kuantitatif, Kualitatif, dan Studi Kasus)* (Apri Nuryanto (ed.)). ALFABETA, cv.
- Syah, F., Aulia, & Hidayat, M. (2021). Analisis Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus pada Kantor Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong). *Jurnal Economix*, 9(1), 94–104.
- Wufron, W., Cupiadi, H., Kurniawan, D. A., Dewi, A., & Ayuni, S. (2025). Virtual Account Performance on Student Satisfaction: An Analysis through Perceived Ease of Use and Usefulness. *Ilomata International Journal of Management*, 6(3), 1034–1052. <https://doi.org/10.61194/ijjm.v6i3.1493>